

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2017



ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2017



Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir 2017

ISBN : 978-602-6431-33-2

No. Katalog : 4102002.1206

No. Publikasi : 12060.1922

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Halaman Buku : xii + 80 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir

Desain Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik

**“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”**

**TIM PENYUSUN PUBLIKASI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017**

Penanggung Jawab : Drs. Whenlis, M.Si
Penyunting : Sartika C.Y. Pardede, SST
Penulis : Marissa Sinaga, SST
Pengolah Data : Marissa Sinaga, SST
Gambar Kulit : Eirene Debora Simanullang, SST

<https://tobasamosirkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik, khususnya data mengenai kualitas sumber daya manusia Kabupaten Toba Samosir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir telah menyelesaikan buku publikasi "**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 2017**".

Publikasi ini menyajikan data IPM yang dihitung berdasarkan metode baru yang merupakan penyempurnaan dari metode yang digunakan pada tahun sebelumnya. IPM metode baru ini menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik, di samping itu capaian yang rendah pada satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian komponen lain yang nilainya lebih tinggi.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, para peneliti, akademisi, dan pemakai data pada umumnya serta pemerintah dapat memanfaatkannya baik sebagai bahan evaluasi maupun bahan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas data dan penyajiannya di masa mendatang.

Balige, November 2019
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Kepala,

Drs. Wrenlis, M.Si
NIP 19660619 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	lii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	Ix
Daftar Gambar	Xi
B A B I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran .	5
1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya	11
1.4. Indeks Pembangunan Manusia : Pengukuran 13	13
Pencapaian Pembangunan	
1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia 15	15
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	
1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah....	16
1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia	18
B A B II. METODOLOGI PENELITIAN	21
2.1. Sumber Data	21
2.2. Konsep Definisi	21
2.3. Konsep IPM dan Teknik Penghitungan.....	23
B A B III. KONDISI DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI	31
3.1. Kependudukan	31
3.2. Pendidikan.....	36
3.3. Ketenagakerjaan	39
3.4. Perekonomian	42

B A B IV.	KONDISI KOMPONEN-KOMPONEN IPM.....	49
	4.1. Indeks Pengetahuan	49
	4.2. Indeks Kesehatan.....	54
	4.3. Indeks Daya Beli	55
B A B V.	STATUS DAN PERKEMBANGAN IPM.....	59
	5.1. Status Pembangunan Manusia	59
B A B VI.	HUBUNGAN IPM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	65
	6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi	65
	6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita	68
B A B VII.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	73
	7.1. Kesimpulan	73
	7.2. Rekomendasi.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM	27
Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2017	32
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	33
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	35
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	37
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	38
Tabel 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2017	40
Tabel 3.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2017	40
Tabel 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	41
Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)	43

Tabel 4.1	Persentase Penduduk Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2017	50
Tabel 5.1	Status Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen IPM Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	61
Tabel 6.1	PDRB Perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2016 – 2017	67

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.....	9
Gambar 2	Tingkat Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara 2017 (Persentase).....	51
Gambar 3	Tingkat Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara 2017 (Persentase).....	52
Gambar 4	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara 2017	53
Gambar 5	Angka Harapan Hidup Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017	55
Gambar 6	Pengeluaran Penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016 (000 Rupiah).....	56
Gambar 7	IPM Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017	60
Gambar 8	Perkembangan PDRB Per Kapita Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017 (000 Rupiah).....	69



P E N D A H U L U A N



1.1. Latar belakang.

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki :

- 1) peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat,
- 2) pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, serta
- 3) peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkret dan berkesinambungan. Misalnya untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan,

manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan untuk meningkatkan angka melek huruf. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun atau tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan terciptanya daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Selain itu secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia, terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*), bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (*United Nations Development Programme*, 1996).

1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran.

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan atau nafkah dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus diperhatikan, tidak hanya untuk sekarang tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya (fisik, manusia, dan lingkungan) harus selalu diperbaharui (*replenished*).

Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus dari dan oleh penduduk, bukan hanya untuk mereka.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai di sana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk berkreasi dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia, seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang, maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1995 : II).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas, jauh lebih dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen

perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi (atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi) merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi menjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik seperti disajikan pada gambar 1, artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Arah panah bawah-atas menegaskan arti penting pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Arah panah atas-bawah yang merupakan asumsi dasar pendekatan SDM, merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (*economic reasons*) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.

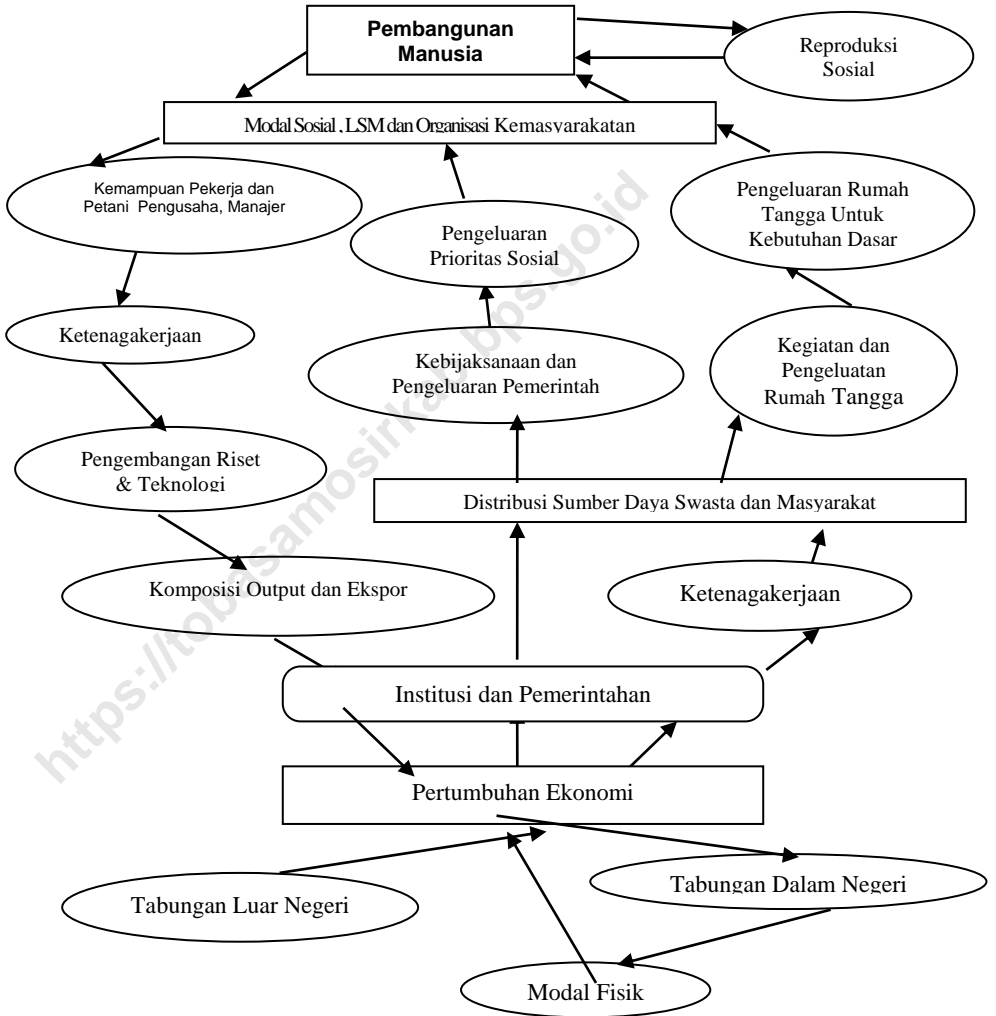
Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Contohnya adalah Cina, Mongolia, Korea Utara dan Brasil (Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan UNDP). Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Contohnya Sri Lanka, Costa Rica, Trinidad dan Tobago (Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan

UNDP). Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Namun pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur.

- Jalur **pertama** melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.
- Jalur **kedua** adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “ jembatan utama “ yang menghubungkan keduanya (UNDP, 1996 : 87).

Gambar 1. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : United Nations Development Programme (1996)

Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada gambar 1 adalah jelas. Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Lembaga pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya), hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai suatu katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia secara efisien.

1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan dititikberatkan pada pembangunan sumber

daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada sektor ekonomi, asas pemerataan yang diimplementasikan antara lain adalah dengan memberikan kredit untuk petani berupa Kredit Usaha Tani (KUT), yang diperkirakan memberikan pengaruh yang besar karena sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 55% pada tahun 1985, 50% pada tahun 1990, 44% pada akhir dekade 1990-an dan mencapai 44,33% pada tahun 2002). Bahkan hingga saat ini pun, lebih dari 42 persen penduduk Sumatera Utara masih bekerja di sektor pertanian. Juga upaya pemberdayaan dilakukan usaha bagi penduduk miskin melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra) serta Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra).

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan tumbuhnya kesempatan kerja dan berusaha memungkinkan peningkatan pendapatan penduduk, yang secara nyata kemudian mengurangi jumlah penduduk hidup miskin. Hal ini merupakan 'jembatan utama' dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya merupakan prinsip pemberdayaan.

Pembangunan bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran hingga setengahnya (dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,8 tahun 2000) yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk. Dari sudut pandang pembangunan, keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial (seperti angka kematian bayi, angka melek huruf, pendidikan yang ditamatkan penduduk, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat daya beli penduduk, dll) berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.

1.4. Indeks Pembangunan Manusia: Pengukuran Pencapaian Pembangunan

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah :

- 1) umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup ataupun harapan hidup,

- 2) berpengetahuan dan berketerampilan, serta
- 3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia, dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu:

- a. angka harapan hidup waktu lahir (e_0),
- b. pencapaian pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah,
- c. harapan lama sekolah,
- d. pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup empat komponen (angka harapan hidup waktu lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita) maka Indeks Pembangunan Manusia harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks yang tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan yang diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menurunnya kesempatan kerja (kesempatan kerja pada bulan Agustus 1997 mencapai 95,3%, menjadi 94,5% pada tahun 1998 dan 93,6% pada tahun 1999, pada tahun 2002 mencapai 90,94%) yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997–1998 (inflasi mengalami peningkatan dari 6% pada tahun 1997 menjadi 78% pada tahun 1998, pada tahun 2001 sebesar 12,55% dan 2002 sebesar 10,03%). Menurunnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia, merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk.

1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM (antara 0 – 100) menunjukkan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan :

- i. antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan/kemunduran setelah suatu periode, atau

- ii. antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan/kemunduran suatu wilayah yang relatif dekat terhadap wilayah lain.

Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah, sebagai alat ukur komposit, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang berkaitan.

Di sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu perumusan kebijakan yang lebih terarah, kajian situasi pembangunan manusia perlu dilakukan di suatu wilayah untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan aktualisasi dari aspirasi masyarakat suatu bangsa, yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana (Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tingkat II Tahun 1990-1996; Kerjasama BPS, UNDP, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah). Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Proses perencanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Kajian situasi dan kondisi yang obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pelbagai program pembangunan, perlu dilakukan untuk menentukan pentahapan, pencapaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek serta untuk menentukan prioritas.

Melalui kajian tersebut dirumuskan suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi para perencana dalam merancang berbagai program.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan *database* yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem *database* pembangunan manusia. Sistem *database* tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi yang dapat digunakan para pengambil keputusan dan

perumus kebijakan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik dilakukan serta ujicoba pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan.

1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia

Analisis situasi merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan yang lazim dilakukan setelah visi dan sasaran jangka panjang ditetapkan. Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah tahapan perencanaan berikutnya yaitu penetapan prioritas dan sasaran jangka menengah dan jangka pendek, serta mengidentifikasi pilihan kebijakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan manusia, analisis situasi harus dilakukan secara menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap berkaitan dengan konsep global pembangunan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis tersebut disebut sebagai *issue* pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga IPM merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kajian ini disebut Analisis Situasi Pembangunan Manusia karena hanya mengkaji kemajuan suatu wilayah, sedangkan pada tingkat propinsi kajian ini disebut Laporan Pembangunan Manusia karena juga mengkaji perbandingan kemajuan dan pencapaian pembangunan antar

kabupaten/kota dan indikator yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia yang diperkaya dengan permasalahan spesifik daerah yang dikemukakan.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>



2

METODOLOGI PENELITIAN

SUMBER: PINTEREST.COM

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah data yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

2.2. Konsep Definisi

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang pada umumnya merupakan wilayah kerja seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas yang jelas baik batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sekitar 10 tahun.

Segmen adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas jelas. Dengan perkataan lain blok sensus dibagi habis menjadi beberapa segmen.

Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya

makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah 10 orang atau lebih, **tidak dicakup dalam survei ini.**

Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

Masih sekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Konsumsi/Pengeluaran

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga selama sebulan untuk konsumsi baik konsumsi makanan maupun bukan makanan semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

2.3. Konsep IPM dan Teknik Penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan

(*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung HDI.

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penghitungan metode dan prosedur penghitungan IPM serta komponen-komponennya .

Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 .

- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010.

Pengetahuan

Seperti halnya UNDP, komponen IPM, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling, MYS*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling- EYS*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

- Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
- Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

- HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
- HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.
- Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak.

- Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.
- Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Tahapan Penghitungan IPM

Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (e_o , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

X_i = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-
($i=1,2,3$)

X_{\min} = Nilai minimum X_i

X_{\max} = Nilai maksimum X_i

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis :

Indeks Pembangunan Manusia :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pendapatan}}} \times 100$$

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352* (Rp)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

3

KONDISI DAN POTENSIAL EKONOMI

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>



SUMBER: PINTEREST.COM

Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak di antara 2°03' - 2°40' Lintang Utara dan 98°56' – 99°40' Bujur Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun di sebelah Utara, Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu di sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan sebelah Barat dengan Kabupaten Samosir. Luas Kabupaten Toba Samosir adalah ± 2.021,80 Km² meliputi 16 Kecamatan dan 244 Desa/Kelurahan (231 Desa dan 13 Kelurahan)

3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada pertengahan tahun 2010 (hasil Sensus Penduduk 2010) berjumlah 173.129 jiwa, pada pertengahan tahun 2011 (angka proyeksi) berjumlah 174.748 jiwa, pada pertengahan tahun 2012 (angka proyeksi) berjumlah 174.865 jiwa, pada pertengahan tahun 2013 (angka proyeksi) berjumlah 175.069 jiwa, pada pertengahan tahun 2014 (angka proyeksi) berjumlah 178.568 jiwa, pada pertengahan tahun 2015 (angka proyeksi) berjumlah 179.704 jiwa, pada pertengahan tahun 2016 (angka proyeksi) berjumlah 180.694 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2017 (angka proyeksi) berjumlah 181.790 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir ini menunjukkan adanya peningkatan, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar.

Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2017

Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa/Kelurahan		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balige	91,05	29	6	35
Tampahan	24,45	6	-	6
Laguboti	73,90	22	1	23
Habinsaran	408,70	21	1	22
Borbor	176,65	15	-	15
Nassau	335,50	10	-	10
Silaen	172,58	23	-	23
Sigumpar	25,20	9	1	10
Porsea	37,88	14	3	17
Pintu Pohan Meranti	277,27	7	-	7
Siantar Narumonda	22,20	14	-	14
Lumban Julu	90,90	12	-	12
Uluan	109,00	17	-	17
Ajibata	72,80	9	1	10
Parmaksian	45,98	11	-	11
Bonatua Lunasi	57,74	12	-	12
Toba Samosir	2.021,80	231	13	244

Sumber : Toba Samosir Dalam Angka 2018

Sebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toba Samosir masih timpang. Tidak merata atau timpangnya sebaran penduduk, tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Kabupaten Toba Samosir yang mempunyai luas wilayah 2.021,80 km², kepadatan penduduknya mencapai 89,91 jiwa per km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu Kecamatan Habinsaran dengan kepadatan

penduduk mencapai 39,62 jiwa per km². Sedangkan daerah yang luas wilayahnya paling kecil, Kecamatan Siantar Narumonda, kepadatan penduduknya sudah mencapai 270,41 jiwa per km².

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Balige	19 269	19 298	38 567	423,58
2. Tampahan	2 270	2 238	4 508	183,38
3. Laguboti	9 411	9 883	19 294	261,08
4. Habinsaran	8 023	8 169	16 192	39,62
5. Borbor	3 576	3 529	7 105	40,22
6. Nassau	3 843	3 708	7 551	22,51
7. Silaen	6 260	6 419	12 679	73,47
8. Sigumpar	3 863	3 935	7 798	309,44
9. Porsea	7 002	7 070	14 072	371,49
10. Pintu Pohan Meranti	3 681	3 719	7 400	26,69
11. Siantar Narumonda	2 930	3 073	6 003	270,41
12. Parmaksian	5 424	5 370	10 794	234,75
13. Lumban Julu	4 188	4 355	8 543	93,98
14. Uluan	4 180	4 232	8 412	77,17
15. Ajibata	3 786	3 802	7 588	104,23
16. Bonatua Lunasi	2 591	2 693	5 284	91,51
Toba Samosir	90 297	91 493	181 790	89,91

Sumber : Toba Samosir Dalam Angka 2018

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Balige dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 423,58 jiwa per km². Sebaliknya daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Nassau dengan kepadatan penduduk hanya mencapai 22,51 jiwa per km². Secara keseluruhan ada 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah rata-rata kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Habinsaran (39,62 jiwa per km²), Borbor (40,22 jiwa per km²), Nassau (22,51 jiwa per km²), Silaen (73,47 jiwa per km²), Pintu Pohan Meranti (26,69 jiwa per km²), dan Uluan (77,17 jiwa per km²).

Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata Kabupaten Toba Samosir masih tergolong struktur umur muda. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (di bawah 15 tahun) sebesar 34,28 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,66 persen. Hal ini memberikan implikasi bahwa kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi pembangunan di masa yang akan datang.

Besarnya penduduk usia muda ini mengakibatkan beban tanggungan penduduk usia produktif juga semakin besar. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator pengukur kemajuan ekonomi dari suatu daerah. Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk berusia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun yang dianggap tidak produktif secara ekonomi dengan jumlah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang dianggap produktif secara ekonomi. Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil jumlah penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 2017

Golongan Umur	Persentase		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	11,74	11,20	11,47
5-9	12,12	11,49	11,81
10-14	11,14	10,23	10,68
15-19	10,16	8,67	9,41
20-24	5,60	4,58	5,09
25-29	6,19	5,60	5,89
30-34	6,39	6,11	6,25
35-39	6,30	6,11	6,20
40-44	5,95	6,02	5,98
45-49	5,35	5,65	5,50
50-54	4,74	5,48	5,11
55-59	4,58	5,75	5,17
60-64	4,28	4,86	4,57
65+	5,47	8,24	6,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Angka Beban Tanggungan Anak			57,37
Angka Beban Tanggungan Usia Lanjut			11,60
Angka Beban Tanggungan			68,97

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir

Beban tanggungan anak di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 sebesar 57,37 dan beban tanggungan usia lanjut sebesar 11,60. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 58 orang anak dan 11 orang usia lanjut. Dengan kata lain bahwa

beban tanggungan di Kabupaten Toba Samosir masih cukup besar yaitu mencapai 68,97.

3.2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat tergantung kepada kualitas pendidikan. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial.

Pada tahun 2017, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah, menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Kabupaten Toba Samosir tidak bersekolah lagi, yaitu 73,61 persen (72,67 persen untuk penduduk laki-laki dan 74,51 persen untuk penduduk perempuan). Adapun penduduk yang masih sekolah sekitar 25,17 persen (26,57 persen penduduk laki-laki dan 23,82 persen untuk penduduk perempuan), sedangkan penduduk yang tidak sekolah/belum pernah sekolah masih ada sekitar 1,22 persen (0,76 persen untuk laki-laki dan 1,67 persen untuk penduduk perempuan).

Tabel 3.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis kelamin, 2017

Status Pendidikan	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,76	1,67	1,22
Masih Sekolah			
- SD	9,92	8,75	9,32
- SMTP	7,57	7,48	7,52
- SMTA	8,45	6,89	7,66
- Diploma/Sarjana	0,63	0,70	0,67
Tidak Bersekolah Lagi	72,67	74,51	73,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017, BPS Kabupaten Toba Samosir

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis kelamin, 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,76	1,67	1,22
Tidak/Belum Tamat SD	16,40	19,67	18,06
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
- SD	17,47	17,33	17,40
- SMTP	25,10	21,83	23,44
- SMTA	34,87	30,68	32,74
- Diploma I/II	0,17	0,61	0,39
- Diploma III	0,69	1,92	1,32
- Diploma IV/Sarjana	4,54	6,29	5,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017, BPS Kabupaten Toba Samosir

Keadaan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Toba Samosir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di tingkat Diploma/Sarjana. Hasil Susenas 2017 menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar 80,72 persen, selebihnya sekitar 19,28 persen adalah mereka yang berpendidikan SD kebawah. Dari mereka yang telah menamatkan paling tidak SD tersebut, hanya sekitar 7,14 persen yang tamat Diploma/Sarjana dan 56,18 persen tamat pendidikan menengah.

3.3. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai : (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, dan (ii) bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas, dalam pasar kerja.

Persentase penduduk usia kerja di Toba Samosir yang bekerja adalah sebesar 77,50 persen dimana laki-laki sebesar 79,40 persen dan perempuan sebesar 75,68 persen. Sedangkan penduduk usia kerja yang pernah bekerja sebesar 1,17 persen dan yang tidak pernah bekerja sebesar 1,62 persen.

TPAK Toba Samosir berdasarkan hasil Sakernas 2017 adalah sebesar 80,30 persen. TPAK perempuan lebih tinggi dari TPAK laki-laki, hal ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Adapun TPAK laki-laki sebesar 76,43 persen dan TPAK perempuan 84,36 persen. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki sebanyak 1,84 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,50 persen sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 2,18 persen.

Lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian dan Pertambangan/penggalan), sektor M (Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiganya biasa disebut sebagai sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier.

Tabel 3.6 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2017

Kegiatan Utama	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja			
- Bekerja	82,24	75,02	78,55
- Pernah Bekerja	0,90	-	0,44
- Tidak Pernah Bekerja	1,21	1,41	1,31
- Sekolah	7,50	6,88	7,18
- Mengurus Rumah tangga	1,52	10,88	6,31
- Lainnya	6,63	5,81	6,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00
T P A K	76,43	84,36	80,30
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,84	2,50	2,18

Sumber: Sakernas 2017, BPS Kabupaten Toba Samsir

Tabel 3.7. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin, 2017

Lapangan Usaha	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	55,74	59,41	57,53
2. Manufaktur	15,39	6,44	11,02
3. Jasa	28,87	34,15	31,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2017, BPS Kabupaten Toba Samsir

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Toba Samosir menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling menonjol, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari hasil Sakernas 2017, sekitar 57,53 persen penduduk daerah ini bekerja di sektor pertanian, dan sisanya di sektor lainnya (42,47 persen). Tingginya persentase pekerja pada sektor pertanian di Kabupaten Toba Samosir, antara lain disebabkan daerah ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian dan didukung pula oleh daerahnya yang cukup luas.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
-Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/Sekolah Dasar	17,86	22,32	20,03
- Sekolah Menengah Pertama	24,27	25,92	25,07
- Sekolah Menengah Atas	32,83	25,12	29,08
- Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	17,19	12,72	15,01
- Diploma I/II/III	1,77	4,55	3,13
- D IV/ Universitas	6,08	9,37	7,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2017, BPS Kabupaten Toba Samosir

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang bekerja didominasi pada tingkat Sekolah Menengah Atas yakni sebesar

29,08 persen dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 25,07 persen. Kondisi tersebut sangat memungkinkan mengingat lapangan usaha utama di Kabupaten Toba Samosir adalah pertanian tradisional, yang memang tidak membutuhkan pekerja dengan kualitas pendidikan tinggi. Tambahan lagi penduduk yang berpendidikan tinggi lebih banyak yang pergi keluar daerah untuk ikut terlibat langsung dalam pasar kerja, dan bersaing merebut pekerjaan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.

3.4. Perekonomian

Untuk menilai atau mengetahui berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan, perlu adanya suatu indikator guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan regional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan untuk mengetahui berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan.

Salah satu indikator makro dibutuhkan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai pada tahun 2016 disajikan dengan tahun dasar yang baru yaitu 2010, dan disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan maksud agar dapat ditelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh perubahan harga.

Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 - 2017 (Juta Rupiah)

	Lapangan usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
		2016	2017 *)	2016	2017*)
	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 055 321,3	2 162 060,7	1 620 967,8	1 678 633,2
B.	Pertambangan dan Penggalian	17 318,5	18 346,2	14 008,7	14 876,6
C.	Industri pengolahan	687 931,4	771 562,8	524 575,7	551 068
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3 730,2	4 212,2	4 072,4	4 311,6
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 938,9	3 099,8	2 462,4	2 518,7
F.	Konstruksi	763 958,3	854 607,5	606 935,8	652 144,4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 023 397,5	1 122 039,6	765 892,1	807 485,3

	Lapangan usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
		2016	2017 *)	2016	2017*)
H.	Transportasi dan Pergudangan	192 987,1	212 110,2	140 997,7	149 973,4
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174 156,3	187 243,6	139 934,7	147 085,1
J.	Informasi dan Komunikasi	63 198,2	69 370,5	62 122,0	66 830,4
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	97 235,3	106 460,0	81 873,4	86 658,1
L.	Real Estat	168 493,8	184 569,5	133 391,4	142 686,4
M,N	Jasa Perusahaan	52 067,8	57 740,9	38 992,7	41 465,0
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	607 897,9	656 137,4	454 008,0	467 223,1
P.	Jasa Pendidikan	152 231,2	166 164,3	132 178,6	141 064,7
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51 981,2	56 034,2	38 519,8	40 489,6
R,S, T,U	Jasa Lainnya	9 122,8	10 071,0	7 181,3	7 643,8
	P D R B	6 123 907,62	6 641 770,7	4 767 984,66	5 001 927,5

Sumber: **Toba Samosir Dalam Angka 2019**

Catatan: *) angka sementara

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 mencapai 4,91 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 32,70 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2106. Penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Kabupaten Toba Samosir adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,15 persen.

Peranan yang mempunyai peranan yang sangat kecil dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Toba Samosir adalah dari kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 0,05 persen.

Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang cukup tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada perkembangan jumlah penduduk. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi jika pertumbuhan penduduk tidak dapat ditekan maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkatkan PDRB perkapita masyarakat. Sedangkan bila terjadi pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang negatif akan menunjukkan terjadinya penurunan kesejahteraan rakyat. PDRB perkapita sebagai salah satu alat pengukur tingkat kemakmuran merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, demikian pula dengan PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir Atas Dasar Harga Konstan 2010 mengalami kenaikan. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar 33.982.690 rupiah menjadi 36.615.270 rupiah pada tahun 2017, sedang PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

2010 pada tahun 2016 sebesar 26.397.140 rupiah naik menjadi 27.535.660 rupiah pada tahun 2017.

PDRB perkapita tidak mutlak dapat dikatakan sebagai pendapatan dari masyarakat pada daerah tersebut, karena Nilai Tambah Bruto (NTB) dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah belum tentu dinikmati seluruhnya oleh masyarakat daerah tersebut sehingga PDRB perkapita tidak dapat digambarkan langsung sebagai pendapatan perkapita.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>



4

KONDISI KOMPONEN - KOMPONEN I P M

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

SUMBER: PINTEREST.COM

4.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban amanat ini yang diaktualisasikan melalui Renstra Kabupaten Toba Samosir dan kebijakan pembiayaan melalui APBN dan APBD.

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk berusia 10 tahun ke atas, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2017 angka melek huruf di Kabupaten Toba Samosir adalah 99,20 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka melek huruf Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 98,96 persen. Tabel 4.1 menyajikan angka melek huruf selama dua tahun terakhir disertai Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan perbandingan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara makro di Kabupaten Toba Samosir sudah lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara secara umum.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Melek Huruf Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Toba Samosir		Sumatera Utara
	2016	2017	2017
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-Laki	99,55	99,82	99,46
Perempuan	98,49	98,61	98,47
Laki-laki + Perempuan	99,01	99,20	98,96

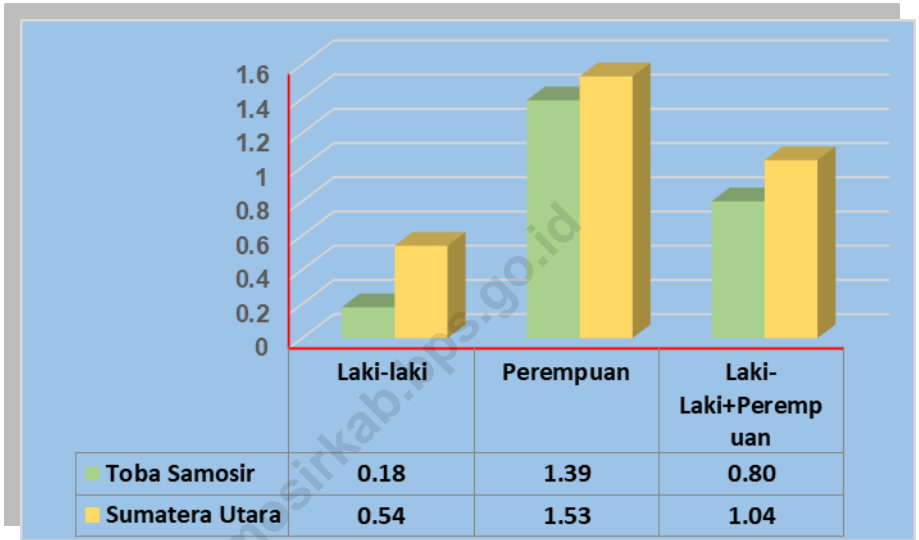
Sumber : **Susenas 2017**

Jika dibandingkan dari tahun 2016, maka tingkat melek huruf di Toba Samosir pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Di tahun 2017, terlihat bahwa tingkat melek huruf laki-laki lebih tinggi yaitu 99,82 persen dibandingkan perempuan yang hanya sebesar 98,61 persen.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Tingkat buta huruf Kabupaten Toba Samosir lebih rendah di atas rata-rata Sumatera Utara .

Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka tingkat buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Toba Samosir jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yaitu masing-masing 1,51 persen dan 0,45 persen.

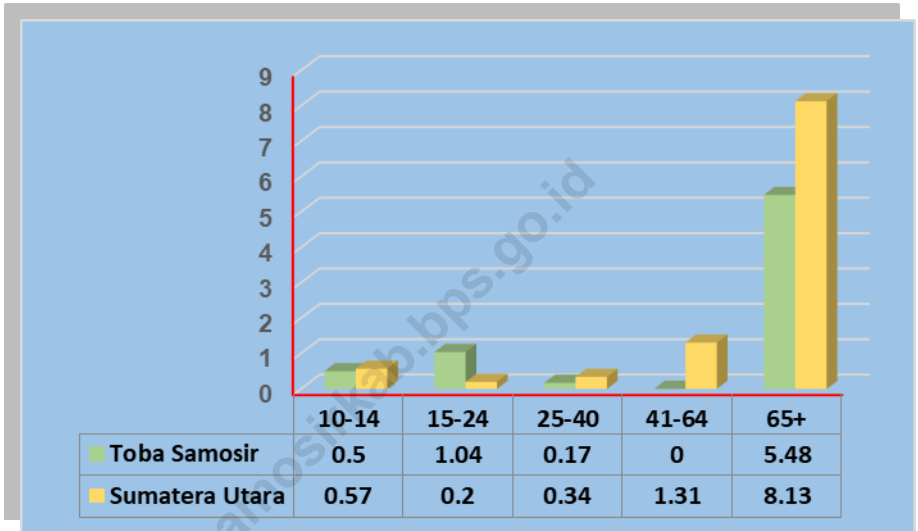
Gambar 2. Tingkat Buta Huruf Usia 10 Tahun ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 (Persentase)



Sumber : **Susenas 2017**

Tingkat buta huruf menurut kelompok umur di Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 3. Tingginya tingkat buta huruf di suatu daerah biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat buta huruf pada kelompok umur tua, karena penduduk jaman dahulu masih banyak yang belum memiliki pendidikan/tidak bersekolah. Pada saat ini rata-rata penduduk sudah sadar akan pentingnya pendidikan, namun yang perlu mendapat perhatian serius adalah jika tingkat buta huruf terjadi pada kelompok umur muda dengan angka yang cukup tinggi.

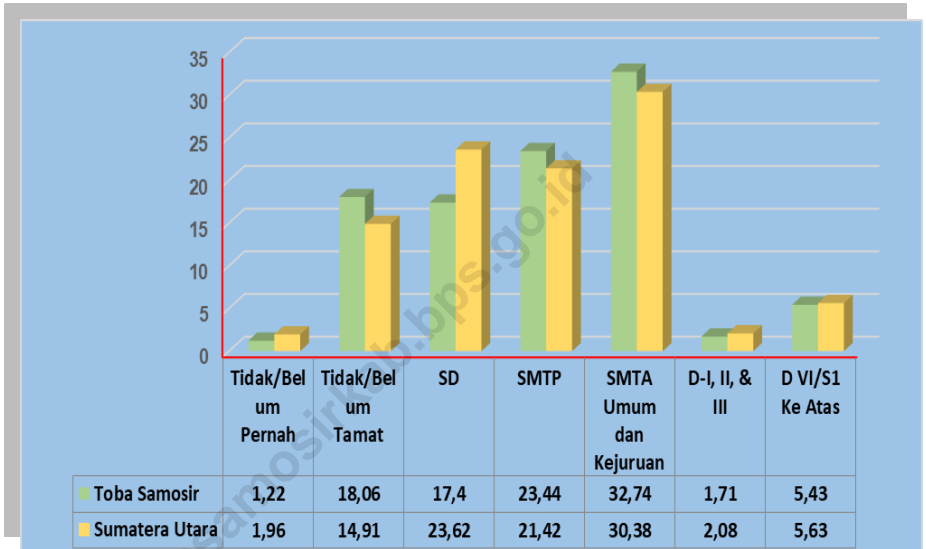
Gambar 3. Tingkat Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 (Persentase)



Sumber: **Susenas 2017**

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Toba Samosir sebesar 10,10 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Toba Samosir sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama bahkan sudah duduk di kelas satu SLTA. Kondisi ini sudah lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 9,25 tahun.

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017



Sumber : **Susenas 2017**

Untuk lebih memperjelas tingkat Ijazah Tertinggi yang dimiliki, pada Gambar 4 disajikan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat Ijazah Tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2017, sebesar 23,44 persen dan 21,42 persen penduduk Kabupaten Toba Samosir serta Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Ijazah Tertinggi SMTP, sekitar 32,74 persen dan 30,38 persen yang memiliki Ijazah Tertinggi SMTA, dan sisanya sebesar 7,14 persen dan 7,71 persen yang tamat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi).

Selanjutnya berkaitan dengan penentuan IPM, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu komponen pembentuk IPM

adalah indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan itu terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2017, dari hasil penghitungan harapan lama sekolah di Toba Samosir tercatat sebesar 13,25 tahun dan rata-rata lama sekolah adalah sebesar 10,10 tahun. Angka ini masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara, dimana harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara masing-masing sebesar 13,10 tahun serta 9,25 tahun.

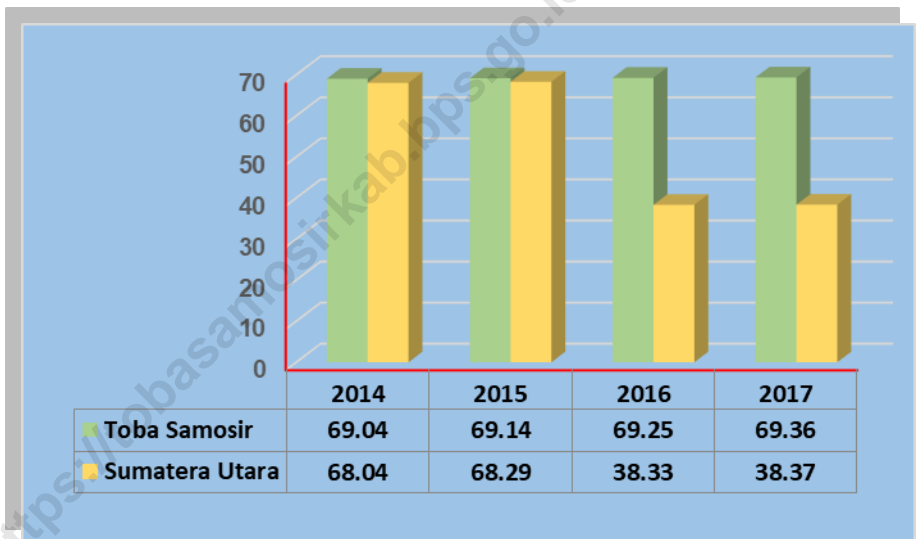
4.2 Indeks Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Angka harapan hidup di Kabupaten Toba Samosir dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2017 diperkirakan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir tercatat sekitar 69,36 tahun, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 69,25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Toba Samosir juga mengalami peningkatan. Jika

dibandingkan dengan angka Sumatera Utara, secara umum maka dapat dikatakan kondisi kesehatan makro di Kabupaten Toba Samosir sudah lebih baik, hal ini digambarkan dengan angka harapan hidup penduduk Toba Samosir yang sudah lebih tinggi dari angka harapan hidup Sumatera Utara yang tercatat 68,37 tahun pada tahun 2017.

Gambar 5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

4.3 Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai bentuk barang/jasa sebagai pengeluaran. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

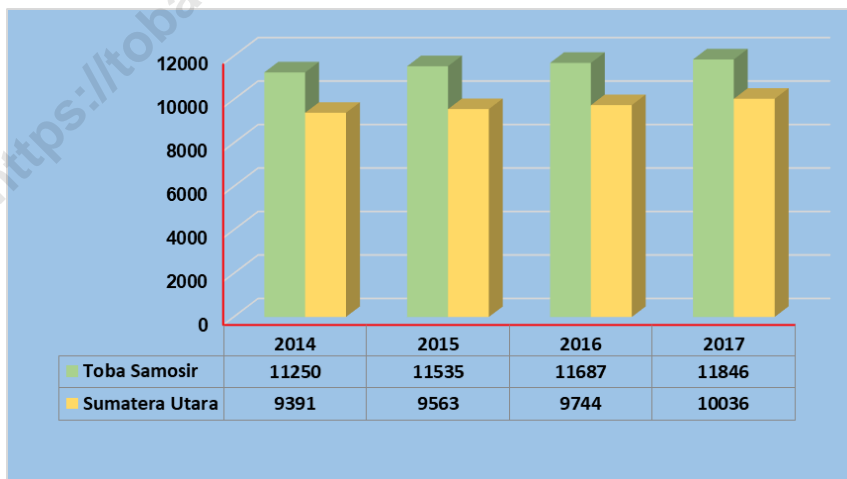
Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2017

perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Pada tahun 2017, daya beli penduduk Toba Samosir diperkirakan sebesar 11.846.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir sudah lebih tinggi, yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017 (000 Rupiah)



Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

5

STATUS DAN PERKEMBANGAN I P M

<https://tobasamosirkab.bps.go.id>

SUMBER: PINTEREST.COM

5.1. Status Pembangunan Manusia

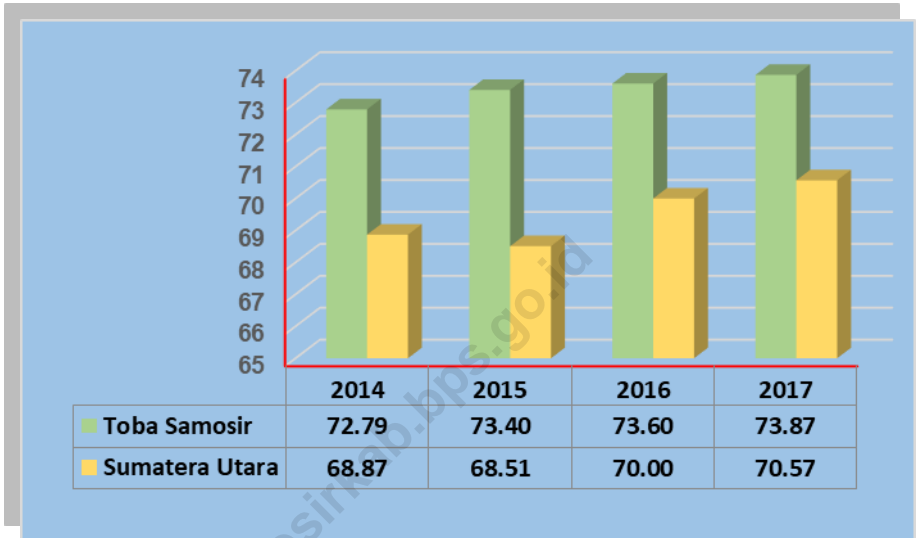
Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan yaitu :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi.
4. Sangat tinggi.

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria sedang hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status dengan kriteria sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM \leq 80$
Sangat tinggi	$IPM > 80$

Gambar 7. IPM Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017



Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

Pada tahun 2017 IPM Toba Samosir adalah sebesar 73,87 dan berada pada status tinggi, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 73,60. Diperlukan usaha yang lebih keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia di Kabupaten Toba Samosir menjadi berstatus sangat tinggi. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan juga kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Jika diperhatikan komponen-komponen pembentuk IPM di Toba Samosir, tampak bahwa kondisi pendidikan dan daya beli sudah lebih baik dari Sumatera Utara secara umum. Hal ini perlu dipertahankan dan kalau dapat ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Komponen yang paling besar memberikan sumbangan bagi peningkatan IPM Kabupaten Toba Samosir adalah usia harapan hidup.

Tabel 5.1 Status Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen IPM Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Komponen IPM	Toba Samosir		Sumatera Utara	
	Nilai	Status	Nilai	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,36		68,37	
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,25		13,10	
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,10		9,25	
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	11.846		10.036	
IPM	73,87	Tinggi	70,57	Tinggi

Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**



6

HUBUNGAN IPM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

<https://tobasamosi.com>



SUMBER: PINTEREST.COM



Bab 6.

HUBUNGAN IPM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah (**UNDP**). Hal ini merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur pemantauan evaluasi, maka fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi indikator kunci bagi terlaksananya pembangunan.

Sebaiknya daerah yang memiliki PDRB yang sudah relatif tinggi mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan PDRB ataupun peningkatan daya beli masyarakat.

6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam GBHN konsep pembangunan menganut konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menghendaki peningkatan kualitas penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Secara eksplisit mungkin dapat kita terjemahkan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan

itu harus dititikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia Artinya pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika kondisi perekonomiannya tidak menentu, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai input, dimana produknya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan.

Tabel 6.1 PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Toba Samosir		Sumatera Utara	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB ADHB Perkapita (Rp)	33.954.467,90	36.615.274,04*)	44.557.762,32	47.963.990,87*)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76	4,91*)	5,18*)	5,12*)
IPM	73,60	73,87	70,00	70,57

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2019

Catatan :*) Angka Sementara,

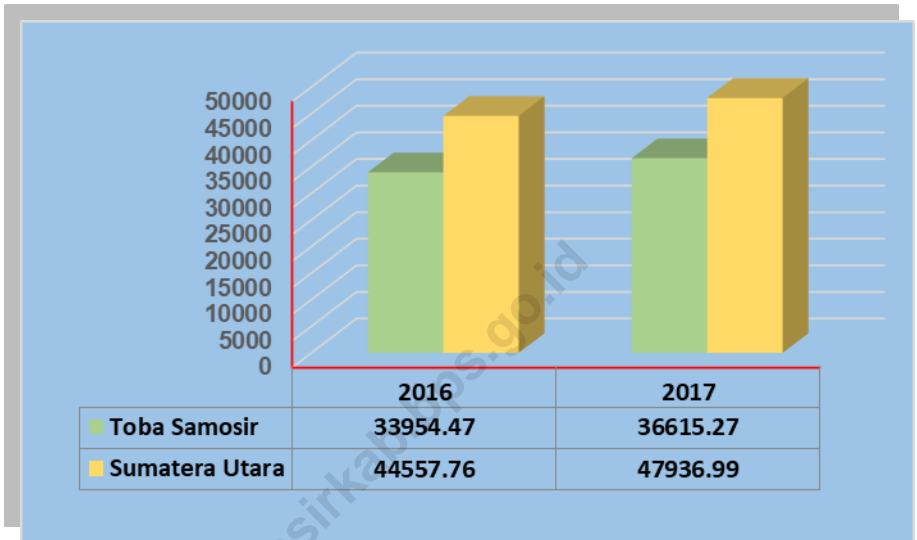
Dari Tabel 6.1 tersebut, menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi/PDRB dengan pembangunan manusia adakalanya membentuk hubungan yang linier. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toba Samosir sebesar 4,76 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 5,18 persen pada tahun yang sama. Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi Toba Samosir dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami percepatan, demikian juga halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Samosir relatif lebih tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara.

6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita

Adanya hubungan timbal balik walaupun tidak bersifat otomatis, antara pembangunan manusia dengan PDRB perkapita terlihat pada tabel 6.1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hubungan itu linier mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita rendah akan berusaha meningkatkan pertumbuhannya ekonominya dan kenaikan angka tersebut cenderung akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB perkapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena jika kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan menghasilkan perubahan pembangunan manusia.

Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB perkapita. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB perkapita yang sudah relatif tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan seperti: sekolah, kesehatan, kehidupan yang layak dan lain-lain.

Gambar 8. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambaran perkembangan PDRB perkapita seperti terlihat pada Gambar 8 bersifat linier. Hal ini dikaitkan dengan Tabel 6.1 terlihat bahwa di Kabupaten Toba Samosir tahun 2016-2017 mengalami peningkatan nilai IPM sebesar 0,27 poin sedangkan PDRB perkapita mengalami peningkatan dari Rp33.954.467,90 pada tahun 2016 menjadi Rp36.615.274,04 pada tahun 2017 atau naik sebesar 7,83 persen.

Demikian juga dengan Provinsi Sumatera Utara, tahun 2016-2017 mengalami peningkatan nilai IPM sebesar 0,57 poin dan PDRB perkapita juga mengalami kenaikan dari Rp44.557.762,32 pada tahun 2016 menjadi Rp47.963.990,87 pada tahun 2017 atau naik sebesar 7,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita yang tinggi akan diikuti oleh peningkatan IPM.



7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

<https://tobasamosirkalibps.go.id>

SUMBER: PINTEREST.COM

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan juga penjelasan-penjelasan yang telah dibuat pada bagian sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu pemerintahan dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
3. Pada tahun 2017 angka harapan hidup sebagai salah satu komponen IPM, di Kabupaten Toba Samosir (69,36 tahun) kondisinya sudah lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara (68,37 tahun).
4. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Toba Samosir sebesar 10,10 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Toba Samosir sudah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama bahkan sudah sampai kelas satu SLTA.
5. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 sebesar 13,25 tahun lebih baik dari angka rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 13,10 tahun.
6. Standar hidup penduduk Kabupaten Toba Samosir masih lebih tinggi dibanding kondisi di Sumatera Utara. Hal ini tercermin melalui tingkat

daya beli penduduk Kabupaten Toba Samosir (Rp11.846.000) yang lebih tinggi dari penduduk Provinsi Sumatera Utara (Rp10.036.000) secara umum.

7. Status pembangunan manusia di Toba Samosir tahun 2016, berada pada kategori tingkat tinggi (73,87).

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan manusia khususnya adalah :

1. Perlu perhatian terhadap sektor pendidikan, guna mencapai harapan lama sekolah dan juga pencapaian rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi lagi Dengan tingkat pendidikan yang memadai diharapkan modal dasar bagi penduduk Kabupaten Toba Samosir juga meningkat.
2. Perhatian pada sektor kesehatan harus terus ditingkatkan, guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Toba Samosir, walaupun dari hasil penilaian nilainya sudah lebih tinggi dari kondisi di Provinsi Sumatera Utara secara umum. Namun perlu perhatian yang lebih untuk diberikan pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai.
3. Perlu penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, agar pembangunan ekonomi tetap kondusif terhadap peningkatan kualitas manusia.

Tabel 1. Tingkat Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2017

Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	0,18	1,39	0,80
Sumatera Utara	0,54	1,53	1,04

Sumber : Susenas 2017

Tabel 2. Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2017

Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	99,82	98,61	99,20
Sumatera Utara	99,46	98,47	98,96

Sumber : Susenas 2017

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017

Pendidikan	Toba Samosir
[1]	[2]
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,76
Tidak/Belum Tamat SD	16,40
SD	17,47
SMTp	25,11
SMTA Umum	25,07
SMTA Kejuruan	9,81
D I, D II	0,17
D III	0,69
D IV/S-1 ke Atas	4,54

Sumber : **Susenas 2017**

Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017

Kelompok pengeluaran	Toba Samosir
[1]	[2]
< 200.000	0,00
200.000-299.999	1,39
300.000-499.999	17,18
500.000-749.999	30,10
750.000-999.999	17,93
1.000.000-1 249.999	12,36
1.250.000-1.459.999	7,32
1.500.000 +	13,72

Sumber : **Susenas 2017**

Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 (Rupiah)

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	552.319	364.677	916.996

Sumber : **Susenas 2017**

Tabel 6. Persentase Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Toba Samosir	62,40	37,60	100,00

Sumber : **Susenas 2017**

Tabel 7. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (Miliar rupiah)

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2013	4.735,41	469.464,02
2014	5.173,39	521.954,95
2015	5.622,75	571.722,01
2016	6.123,91	626.062,91
2017*)	6.641,77	684.275,44

Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

Catatan :*) Angka Sementara

Tabel 8. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2013	4.178,50	398.727,14
2014	4.355,42	419.573,31
2015	4.551,51	440.955,85
2016	4.767,98	463.775,46
2017*)	5.001,93	487.531,23

Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

Catatan :*) Angka Sementara

Tabel 9. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2013	26.689,06	34.544,18
2014	28.971,53	37.913,89
2015	31.287,27	41.019,54
2016	33.954,47	44.557,76
2017*)	36.615,27	47.963,99

Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

Catatan :*) Angka Sementara

Tabel 10. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	Toba Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2013	4,85	6,07
2014	4,23	5,23
2015	4,50	5,10
2016	4,76	5,18
2017*)	4,91	5,12

Sumber : **BPS Provinsi Sumatera Utara**

Catatan :*) Angka Sementara



**SENSUS
EKONOMI**

*Menyediakan Informasi untuk
Pengembangan Usaha
dan Daya Saing Bangsa*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Jl. Somba Debata No. 5 Onan Raja, Balige (22315)
Telp. 0632 - 21480 Fax. 0632 - 322194 Email: bps1206@bps.go.id
<http://tobasamosirkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-44513-2-2

